

Perjuangan Partai Politik Islam di Konstituante 1956 - 1960

M. P.	PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
REFERANSI	11- F- 95
NUMER HARGA	h ₁
KOLEKSI	KK1
NO. SERTIFIKAT	1382/h ₁ /95. p. (2)
NO. ASHIRAH	297.09 a2m PD



Oleh
Drs. Azmi, MA, Ph.D.
FPIPS IKIP Padang

1993

Perjuangan Partai Politik Islam di Konstituante 1956-1960

Pendahuluan

Menarik membicarakan perjuangan Partai Politik Islam di Konstituante antara 1956-1960. Pada tahun 1960, ketika Konstituante dibubarkan, secara politis, umat Islam, yang menyalurkan aspirasi politik mereka melalui partai-partai Masyumi, Nahdhatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Pertis) dan partai kecil lainnya, kehilangan kesempatan mewujudkan cita-cita mereka menjadikan Islam sebagai dasar negara, atau memberikan tekanan kepada betapa pentingnya Islam mendapatkan posisi dalam negara Indonesia. Menjadi pertanyaan, mengapa umat Islam Indonesia yang jumlahnya mencapai 90%, gagal memberikan suara mayoritas kepada partai-partai Islam di Parlemen dan Konstituante.

Perjuangan umat Islam untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera berdasar agama Islam tidaklah baru. Umat Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku bersama-sama mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Ketika perlawanan bersenjata gagal pada akhir abad XIX, di awal abad XX mereka bangkit lagi dalam pergerakan kebangsaan. Pada mulanya mereka bergerak dalam organisasi sosial seperti, N.U., Muhammadiyah dan Serikat Islam. Kemudian diantara organisasi itu menjadi gerakan politik seperti Partai

Serikat Islam. Malah di Sumatera Barat lahir partai politik Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Mendekati tahun 1940, pemerintah menahan tokoh-tokoh semua partai politik yang dianggap ekstrim, yang diizinkan bebas hanyalah yang co, yang mau bekerjasama dengan Belanda.

Pada mulanya umat Islam mendapat perlakuan baik dari tentara pendudukan Jepang karena sifat keagamaan mereka yang anti penjajahan dapat digunakan Jepang melawan Belanda. Menurut Benda (1958 : 201-202) beberapa waktu lamanya kelihatan Jepang lebih memberi konsessi kepada tuntutan golongan Islam dari pada kepada golongan nasionalis. Barulah kemudian, ketika Jepang sudah menderita kekalahan, pada waktu menjanjikan akan memberi kemerdekaan, Jepang lebih mendukung tuntutan kaum nasionalis. Bagaimanapun juga, Islam telah mendapat posisi yang selama ini tidak diperoleh dari Belanda yang tidak mungkin diremehkan begitu saja oleh golongan nasionalis.

Keuntungan tersebut menurut Boland (1971:9) antara lain adalah didirikannya Kantor Urusan Agama (Shumubu), berdirinya Masyumi dan pembentukan Hizbullah. Pada akhir Maret 1942, Shumubu dipimpin oleh Kolonel Hori dan pada 1 Oktober 1943 ditunjuk Husen Jayadiningrat. Pada tanggal 1 Agustus 1944 kantor ini dipimpin oleh K.Hasyim Asy'ari, pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng. Untuk itu dia dibantu oleh anaknya K.H. Wahid Hasyim. Pada tahun 1944 dibentuk pula Kantor Urusan Agama di

setiap keresidenan. Di bawah usaha Wahid Hasyim dan Kahar Muzakir ditetapkan landasan organisasi yang akan menjadi Departemen Agama kemudian. Pada tahun 1950 Wahid Hasyim diangkat sebagai Menteri Agama dan dia dapat dianggap sebagai penubuh Kementerian/Departemen Agama.

Pada bulan Oktober 1943, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang dibentuk tahun 1937 dibubarkan Jepang, diganti dengan dibentuknya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan tujuan memperkuat persatuan antara organisasi Islam. Berbeda dengan MIAI, Masyumi didukung oleh dua organisasi besar, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari dan anaknya Wahid Hasyim diangkat sebagai ketua dan salah seorang wakil Ketua Masyumi. Akhirnya Masyumi menjadi partai politik pada tanggal 7 November 1945.

Hizbullah didirikan pada akhir tahun 1944 sejenis organisasi militer untuk pemuda Islam, merupakan sayap militer dari Masyumi. Pasukan ini dibentuk untuk mempersiapkan orang Islam memerdekakan diri dan agamanya. Pada bulan Januari 1945 Masyumi menunjuk pimpinan Hizbullah yakni Zainul Arifin (Wakil NU di Masyumi), Muhammad Roem, Prawoto Mangkusasmito (tokoh Muhammadiyah, kemudian jadi tokoh Masyumi), Yusuf Wibisono dan Anwar Cokroaminoto (kemudian jadi tokoh PSII). Banyak dari lasykar ini kemudian menjadi tokoh militer yang memberi warna pada militer kemudian. Walaupun tidak termasuk dalam kelompok lasykar Islam,

Jenderal Sudirman adalah orang yang mendapat pendidikan di Muhammadiyah yang mestinya punya wawasan keagamaan yang baik.

Perjuangan pemimpin Islam menempatkan agama Islam sebagai pedoman kenegaraan bermula sewaktu Jepang memberi janji kemerdekaan, pertama secara samar-samar 7 September 1945, dan kedua 1 Maret 1945. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari 62 anggota di bawah pimpinan Dr. Rajiman Wediodiningrat yang juga diwakili oleh tokoh-tokoh Islam.

Dalam sidang-sidang BPUPKI ini tokoh-tokoh Islam berjuang keras menempatkan Islam sebagai asas negara. Dalam sidang pertama, Yamin, Supomo dan Sukarno menyampaikan pikirannya tentang negara yang bukan berdasar Islam (untuk lengkapnya dapat dibaca dalam Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Buku I, 61 - 81). Tetapi sayang, Yamin tidak memuat pidato dari wakil Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, KHM Mas Mansur, Sukiman, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Agus Salim. Jelas bahwa perbedaan pendapat itu menjadi sangat serius. Tidak jelas bagaimana pemilihan anggota BPUPKI atau badan-badan sesudah itu dilakukan, sehingga jumlah tokoh-tokoh Islam kurang banyak.

Bagaimanapun, ada dua aliran dalam hal itu, golongan kebangsaan dan golongan Islam, atau istilah yang lebih kena, nasionalis sekuler dan nasionalis

Islam. Bahwa diskusi amat hangat, ternyata dari hasil yang dicapai. Golongan Islam hanya berhasil minimal dengan disahkannya Piagam Jakarta, sebagai pengantar dari UUD 1945, yang menetapkan 7 kata kunci, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" sebagai hasil kompromi. Piagam ini ditandatangani oleh Sukarno, Hatta, AA Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim dan Yamin. Sukarno, Hatta, Maramis dan Yamin dapat dikelompokkan dalam golongan nasionalis sekuler dan sisanya masuk golongan nasionalis agama.

Perjuangan Islam dalam Konstituante

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan ditetapkannya UUD 1945 sebagai dasar negara, sebenarnya masalah dasar negara tidak menjadi persoalan terbuka. Berganti-ganti pemerintahan naik turun, berganti tangan dari pimpinan yang berasal dari tokoh nasionalis sekuler kepada yang berasal dari golongan agama dan sebaliknya. Keadaan ini berlangsung lebih kurang selama 10 tahun, antara 1945-1955. Pembicaraan tentang dasar negara muncul lagi menjelang dan sesudah terbentuknya Konstituante sebagai hasil pemilihan umum pertama, oleh karena UUD yang berlaku bersifat sementara, akibat peralihan dari RI ke RIS dan dari situ menjadi Negara Kesatuan R.I.

Di dalam Konstituante yang membicarakan dasar

negara dan Undang-Undang Dasar, tokoh-tokoh Islam telah berjuang dengan gigih. Walaupun terdapat pertentangan di antara tokoh-tokoh Islam, terutama antara Masyumi dan NU, terakhir menonjol dalam Kabinet Ali kedua dimana Masyumi keluar dan NU tetap tinggal dalam Kabinet, dalam sidang Konstituante mereka bersatu menentang ide Sukarno yang mempertahankan negara tanpa Islam sebagai dasar. Sukarno mempertahankan konsep Pancasila dan berada di pihak non Islam. Ini merupakan tantangan yang berat bagi golongan Islam, karena dia adalah seorang figur yang punya nama dan punya kekuatan, yang sedang memegang kendali negara sebagai presiden.

Sukarno muncul dengan ide "demokrasi terpimpin" semenjak tahun 1957 dan kembali kepada UUD 1945 yang memungkinkan diterapkannya ide demokrasi terpimpin tersebut. Ide ini dilemparkannya ke dalam Kabinet Ali II pada tanggal 5 Desember 1958. Pada tanggal 19 Februari 1959 kabinet, tanpa wakil Masyumi karena sudah keluar dari kabinet, menyetujui kerangka pikiran kembali kepada UUD 1945 dengan mengakui keberadaan Jakarta Charter yang di setujui tanggal 22 Juni 1945.

Kabinet mengajukan usul kembali ke UUD 1945 ke DPR dan menjadi diskusi hangat dalam DPR. Pada sidang tanggal 3 dan 4 April 1959 ide ini mendapat dukungan PNI dan PKI tetapi mendapat tantangan dari golongan agama yakni Masyumi, NU, PSII dan Perti. Pertanyaan

muncul dari Anwar Haryono (Masyumi) sekitar status Piagam Jakarta, apakah demokrasi terpimpin benar-benar demokrasi, apakah kerja Konstituante yang sudah 90% selesai tidak dihargai Ahmad Syaichu mempertanyakan Piagam Jakarta, terutama tentang kewajiban bagi pemeluk Islam menjalankan syariat agamanya.

Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Sukarno berpidato di depan Konstituante dengan judul "Res Publika, sekali lagi Res Publika", menyampaikan ide demokrasi terpimpin dan kembali ke UUD 1945. Disitu Sukarno menjelaskan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 tapi tidak menjelaskan secara tegas bentuk pelaksanaannya. Oleh sebab itulah masalah itu kembali hangat dibicarakan dalam sidang Konstituante antara 22 April dan 2 Juni 1959. Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menyerang ide Demokrasi Terpimpin. Syaifuddin Zukri (NU) meminta agar Piagam Jakarta dijadikan aturan bagi masyarakat Islam. Demikian pula HAMKA menuduh Demokrasi Terpimpin sebagai jalan ke arah diktator. Kahar Muzakir (Masyumi) menghendaki agar Piagam Jakarta jangan dipakai hanya sebagai upaya menenangkan masyarakat Islam. Tokoh PSII mengeritik niat pemerintah melecehkan Konstituante. H. Zainul Arifin (NU) menjelaskan bahwa Piagam Jakarta lah yang membuka jalan bagi Proklamasi dan itulah seharusnya yang jadi dasar pegangan. Tokoh-tokoh politik Islam, seperti Prawoto menekankan bahaya Demokrasi terpimpin, sedang tokoh-tokoh agama menekankan perlunya memberi tempat pada Islam dalam

Wakil-wakil Masyumi, NU, PSII dan Perti bekerjasama dengan baik memperjuangkan posisi agama Islam dalam UUD. Pada tanggal 28 Mei, dalam usaha terakhir, kelompok Islam meliputi, Masyumi, NU, PSII, Perti dan kelompok kecil lainnya, mengajukan usul untuk memasukkan kata kunci Piagam Jakarta dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 dari UUD 1945. Usaha kompromi tampaknya tidak jalan. Tanggal 29 Mei 1959 diadakan voting atas usul golongan Islam, usul itu ditolak dengan 265 suara melawan 201 yang setuju.

Usul untuk kembali ke UUD 1945 (yang didukung PNI, PKI) juga ditolak dalam 3 kali sidang, 30 Mei, 1 Juni dan 2 Juni dengan angka 269 lawan 199, 264 lawan 204 dan 263 lawan 203. Karena tidak mencapai jumlah mayoritas 312 suara, maka kedua usul itu gagal di setuju Konstituante. Wakil IPKI dan PKI mendorong agar Konstituante membubarkan diri dan menyerahkan pilihan pada presiden. Suwiryo (PNI) minta Presiden mengeluarkan dekrit. Selanjutnya PNI dan PKI dan yang sealian menolak hadir sidang sehingga Konstituante gagal melanjutkan sidang. Dalam keadaan begini, Presiden Sukarno yang baru kembali dari Jepang mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959.

Apa yang terjadi kemudian sudah cukup banyak kita ketahui. Demokrasi terpimpin mengarah ke cara diktator Sukarno, seperti diperingatkan Hamka. Tokoh-tokoh

Masyumi dipenjarakan antara lain Natsir, Syafruddin, Burhanuddin Harahap (memang dulunya tokoh PRRI tapi sudah dapat amnesti), Assaat, Prawoto, Roem, Isa Anshary, E.Z. Muttaqin, Yunan Nasution, Kasman, HAMKA dan banyak lainnya (Panji Masyarakat no. 1, Oktober 1966.hal II); semua orang yang dengan gigih menentang Sukarno. Tanpa mereka, tokoh-tokoh yang tinggal tidak mampu berbuat banyak. Bukan saja ide Islam jadi tertinggal, malah Sukarno dengan Ide Nasakomnya makin jauh terperangkap ke dalam pelukan PKI.

Penutup

Kalau melihat kembali tentang apa yang sudah terjadi maka ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa golongan Islam gagal dalam perjuangan mereka. Memang diakui bahwa dalam angka umat Islam di Indonesia besar jumlahnya. Tapi dilihat dari isi, pemahaman mereka tentang Islam berbeda-beda.

Menurut Benda (1958:199) pada dasarnya ada tiga golongan di Indonesia menjelang kemerdekaan, golongan priyayi, nasionalis sekuler dan golongan Islam.

Dalam pembicaraan selanjutnya, kedua golongan terakhir yang banyak berperan; yakni golongan nasionalis sekuler dan golongan Islam. Dari 2 golongan ini Deliar Noer (1970 : 1) mengelompokkan masyarakat Islam ke dalam Muslim Tradisional, Muslim Pembaharuan dan Muslim sekuler. Dari pandangan ini, maka kelompok

Islam sewaktu pembicaraan mengenai UUD terbagi pada 2 golongan, golongan Islam yang religius, ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, terdiri dari Muslim Tradisional dan Muslim Pembaharuan/Modernis, dan golongan Islam sekuler.

Banyak di antara orang Islam, malah ada juga yang taat, seperti Hatta masuk ke dalam kelompok sekuler, bersama dengan "abangan". Mereka inilah yang kemudian menjadi pendukung ide negara tidak berdasar Islam. Pada umumnya mereka mendapat pendidikan Barat dan sedikit banyaknya terpengaruh dengan Barat dalam pandangannya tentang negara, negara harus terpisah dari agama, atau sekuler. Sukarno misalnya, adalah seorang Muslim sebagaimana dinyatakannya dalam penerimaan Dr. Honoris Causa di Universitas Muhammadiyah Jakarta 3 Agustus 1965 dengan pidatonya "Tauhid adalah jiwaku" mengulangi apa yang disebutnya di IAIN Jakarta sebelumnya.

Tetapi seperti diakuinya dalam Pidato di IAIN Sukarno, sewaktu menerima gelar Dr. Honoris Causa ke 24 tanggal 2 Desember 1964 mengatakan bahwa dia tidaklah termasuk berasal dari keluarga Islam yang taat, menurut istilahnya sendiri, "Islam-Islamanlah". Demikianlah kualitas sebagian dari masyarakat Islam, lahirnya Islam, isinya belum, karena itu tidak memahami hakikat Islam.

Kelompok Islam-islaman ini dipengaruhi oleh kelompok nasionalis sekuler (ditakuti-takuti hukum potong tangan) atau tergoda oleh PKI, diimingi dengan

ide sama rata-sama rasa, karena keadaan ekonomi mereka yang rawan. Kelompok ini tidak tertarik dengan ide yang disodorkan oleh tokoh Islam yang menginginkan negara berdasar Islam. Oleh sebab itulah dalam pemilihan umum sebagai alasan pertama, kelompok Islam gagal memperoleh suara mayoritas. Tidak saja masuk PNI, malah ada suara orang Islam yang masuk PKI, oleh karena tokoh agamanya menjadi tokoh PKI.

Alasan kedua adalah tiadanya kesatuan yang erat kelompok Islam dalam mengatur strategi. Pada mulanya Masyumi didirikan dengan maksud itu. Tapi persatuan itu amat longgar. Di dalam Masyumi ada Majelis Syura, badan pertimbangan yang kebanyakan terdiri dari golongan konservatif kiai dan ulama. Golongan ini sangat mendambakan terlaksananya aturan Islam. Tapi dalam perjalanannya Masyumi lebih banyak dikendalikan oleh tokoh politisi, yang berasal dari golongan moderat, umumnya Muhammadiyah. Ulama, menurut pengakuan Wahid Hasyim tertinggal. Mereka menarik diri dari perjuangan, karena mereka melihat setiap masalah hanya dilihat dari pertimbangan politik belaka (Abu Bakar Aceh, 1957). Inilah yang menjadi alasan NU menarik diri dari Masyumi bulan April 1952, di samping masalah-masalah lainnya. Sebab khusus adalah perebutan jabatan Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo. Kalangan NU menginginkan Wahid Hasyim sebagai Menteri sedang golongan politisi menghendaki Faqih Usman dari Muhammadiyah. Feith (1962)

233 - 237) menyoroti masalah ini lebih dalam, tampak bahwa unsur perpecahan ini berakar dari asal organisasi mereka masing-masing. NU berdiri tahun 1926 untuk menghadapi golongan modernis Muhammadiyah yang sangat berkembang cepat. Oleh sebab itu ada perasaan tertentu di antara mereka. Sesudah keluar dari Masyumi, bersama dengan PSII dan kelompok kecil lainnya, NU membentuk Liga Muslimin Indonesia. Perpecahan ini membawa kelemahan pada gerakan Islam. Dalam perjalanan sejarah politik terjadi banyak persaingan di antara mereka. Walaupun pada bulan Juli 1955 terjadi perdamaian antara Masyumi, NU, PSII dan Perti, untuk tidak saling menyerang, tetapi perpecahan ini sudah demikian jauh untuk mampu mengatasi kegagalan dalam Pemilu 1955.

Alasan ketiga mungkin dapat ditambahkan tiadanya contoh negara Islam yang sukses. Oleh sebab itu tokoh sekuler berargumen, Mesir dan Turki saja yang menjadi pusat Islam memilih negara sekuler.

Penutup

Sebagai penutup patut direnungkan hal berikut, terutama bagi yang masih menginginkan berjalannya atau dihormatinya ajaran Islam di Indonesia.

Pertama, sejarah telah menunjukkan bahwa jumlah saja tidak merupakan jaminan, yang penting adalah bagaimana mengembangkan kesadaran bahwa agama Islam itu baik. Apabila penganut Islam menyadari bahwa Islam penting, tanpa aturan khusus negara, mereka dapat menjalankan

agama, karena negara menjamin kemerdekaan beragama. Oleh sebab itu perlu bagi setiap orang memahami dan menjalankan agama dengan baik. Katakanlah kalau setiap orang menyadari SDSB haram, maka seharusnya tidak satu orang Islampun membelinya.

Sekarang tidak mungkin lagi membalikkan sejarah. UUD negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945, sudah ditetapkan dan semua kita harus mendukungnya. Sekarang yang perlu bagaimana kita dapat menjalankan agama dengan baik. Kalau nanti semua kita telah menghayatinya, baik pemimpin atau rakyat, maka Islam itu tentu akan tetap bersyiar. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, suara terbanyak tentu akan menentukan.

Kedua, persatuan dikalangan umat Islam harus dibina. Hasrat golongan harus dikurangi, kalau perlu ditiadakan, demi mencapai cita-cita yang lebih besar. Perbedaan jangan menjadi yang diutamakan, persamaan harus lebih dikedepankan. Tidak pula, dan memang tidak perlu lagi misalnya mengutik-utik perbedaan NU-Muhammadiyah, Muhammadiyah - Perti dan seterusnya. Kalau mau cari perbedaan, dalam masing-masing organisasi sendiri orang sering berbeda pendapat.

Bacaan :

Aceh, Abu Bakar (ed). Sejarah Hidup K.H.A.Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar. Jakarta 1957.

Benda, H.J. The Crescent and the Rising Sun. The Hague, 1958.

Boland, B.J. The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Martinus Nijhssb, The Haque, 1971.

Feith, H. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Cornell University Press, Ithaca 1962.

Yamin, Muh. Naskah Persiapan UUD 1945. 3 jilid. Jakarta 1959-1960.

Noer, Deliar, Hubungan Tiga Golongan. Makalah pada Seminar Sejarah Nasional II No. PV/54, Yogyakarta, 1970.

Panji Masyarakat No. 1 Oktober 1966 Jakarta.